

- Independen** nasional dan internasional,
2. Surat Para Pemimpin Agama kepada Komnas HAM tertanggal 24 November 2001 mengenai tuntutan pembentukan **Tim Penyelidik Independen** yang memiliki legalitas hukum yang tinggi, profesional, tidak melibatkan unsur TNI/Polri, dan integritas moralnya tidak diragukan,
 3. Kesepakatan rapat Para Pemimpin Agama dengan Presidium Dewan Papua di Jayapura tanggal 28 November 2001 yang menegaskan amat pentingnya **Tim Penyelidik Independen**,
 4. Butir keputusan DPRD Propinsi Papua tanggal 30 November 2001 tentang desakan pembentukan **Tim Independen** untuk menangani semua kasus pelanggaran HAM di Papua,
 5. Kewenangan dan kredibilitas Tim Pemantau diragukan,

Maka kami **menyatakan dengan tegas menolak** keberadaan Tim Pemantau yang telah dibentuk oleh Komnas HAM dan tetap berpegang teguh pada tuntutan yang telah kami sampaikan dalam surat kami tanggal 24 November 2001 demi tegaknya kebenaran dan terwujudnya keadilan di Tanah Papua yang belum pernah dialami selama ini.

Demikianlah sikap kami, Para Pemimpin Agama di Papua, setelah mengikuti segala perkembangan yang ada. Terimakasih atas perhatian Anda.

Jayapura, 4 Desember 2001

Pdt. Corinus Berotabui
Sekum Sinode GKI di Tanah Papua

Mgr. Leo Laba Ladjar OFM
Uskup Jayapura

Drs. H. Zubeir D. Hussein
Ketua MUI Papua

Pdt. John Gobay
Ketua Sinode GKII